
BUANA KOMUNIKASI

Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi
<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/buanakomunikasi>

POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK

Muchsin Al-Fikri¹

Universitas Sangga Buana Bandung
muchsinalfikri2020@gmail.com

Fauzi Ismail²

STAIDA Muhamadiyah Garut

Siti Nurjanah³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Rifki Rosyad⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The election of President Jokowi's eldest son Gibran Rakabumi Raka as Prabowo's vice president has caused polemics and controversy among the public. This paper elaborates on dynastic political issues that are considered to threaten the life of democracy in Indonesia, how President Jokowi came in the presidential election to perpetuate his power and what is the fate of democracy and the future of the Republic of Indonesia after Gibran was carried out. What are the positive and negative impacts for this nation. Then what is dynastic politics in the perspective of Political Communication? Using qualitative methods with a case study approach and data collection through in-depth interviews and literature studies. The practice of dynastic politics carried out by President Jokowi by pushing Gibran to become Prabowo's Vice President by manipulating the constitution has brought this nation into the dark alley of democracy. The mandate of reform 98, one of which bans nepotism, has been betrayed by the president. The enormity of the desire for power and to maintain power has blinded the eyes of his heart so that he has the heart to leave the Party that has been raising him and his family.

Keywords: *Dynasty Politics, Democracy, Indonesia, 2024 Presidential Election*



Jurnal Penelitian & Studi
Ilmu Komunikasi
Volume 04
Nomor 02
Halaman 156-162
Bandung, Desember 2023

p-ISSN : 2774 - 2342
e-ISSN : 2774 - 2202

Tanggal Masuk :
15 November 2023
Tanggal Revisi :
22 Desember 2023
Tanggal Diterima :
23 Desember 2023

Abstrak

Terpilihnya putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabumi Raka sebagai Cawapres Prabowo telah memunculkan polemik dan kontroversi di kalangan publik. Paper ini mengelaborasi tentang isu politik dinasti yang dianggap mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia, bagaimana cawe-cawe presiden Jokowi dalam Pilpres untuk melanggengkan kekuasaannya dan bagaimana nasib demokrasi serta masa depan NKRI pasca diusungnya Gibran. Apa dampak positif dan negatifnya bagi bangsa ini. Kemudian bagaimanakah politik dinasti dalam perspektif Komunikasi Politik? Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi Pustaka. Praktek politik dinasti yang dilakukan oleh presiden Jokowi dengan mendorong Gibran menjadi Cawapres Prabowo dengan memanipulasi konstitusi telah membawa bangsa ini ke lorong gelap demokrasi. Amanat reformasi 98 yang salah satunya mengharamkan nepotisme telah dikhianati oleh sang presiden. Dahsyatnya nafsu berkuasa dan mempertahankan kekuasaan telah membutuhkan mata hatinya sehingga dengan teganya meninggalkan Partai yang selama ini membesarkan dirinya dan keluarganya

Kata kunci: *Dynasty Politics, Demokrasi, Indonesia, Pemilihan Presiden 2024*

PENDAHULUAN

Di ujung kekuasaannya Presiden Jokowi telah terjebak ke dalam lorong gelap politik Dinasti setelah *by design* beliau mengaku melakukan cawe-cawe terhadap tahapan proses penentuan Capres dan cawapres yang dilakukan oleh Partai Politik. Cawe-cawe itu adalah kata Bahasa Jawa yang maknanya ikut serta dalam menangani sesuatu. Hal itu beliau tegaskan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana kepresidenan (29/5/1013) (Yanwardhana, 2023).

Puncak cawe-cawe Jokowi adalah dengan ditetapkannya putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto oleh Komisi Pemilihan Umum melalui keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023. Gibran maju melenggang menuju kursi Cawapres setelah Mahkamah Konstitusi yang saat itu digawangi oleh Anwar Usman yang tak lain adalah paman Gibran, mengabulkan gugatan uji materi tentang batas usia Cawapres. Setelah meloloskan iparnya, Anwar Usman sendiri dipecat sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena terbukti melakukan pelanggaran berat terkait kode etik hakim konstitusi. Namun meskipun Anwar diberhentikan tapi keputusannya meloloskan Gibran tetap tidak bisa dibatalkan.

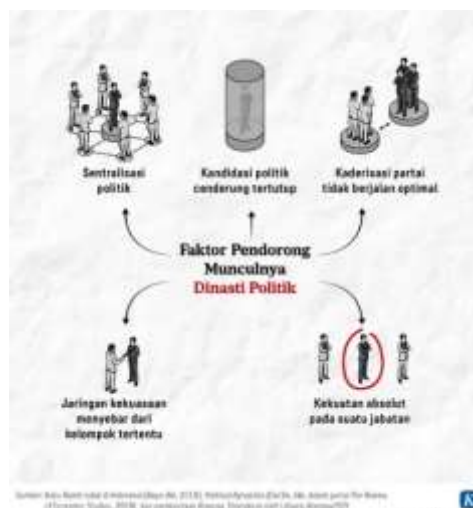
Menurut opini Majalah Tempo, apa yang dilakukan Anwar Usman adalah puncak ambisi Jokowi untuk terus berkuasa. Gagal menggalang dukungan politik dan publik dengan memperpanjang masa jabatan presiden, ia memasangkan anaknya dengan Prabowo (Tempo, 2023). Pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sendiri diusung oleh beberapa partai yang relatif besar seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan beberapa Partai non Parlemen seperti PBB, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dll. Dari seluruh koalisi yang ada, koalisi ini merupakan yang terbesar dengan 261 kursi DPR RI.

Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi II DPR RI pun dengan sigap menggelar rapat untuk menyetujui Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa (31/10/2023) di Gedung Nusantara Senayan Jakarta. PKPU ini diperbaiki pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan syarat Capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum (NN, 2023).

Kemunculan Gibran sebagai Cawapres telah menelan banyak korban politik, mulai dari tersisihnya calon-calon potensial dari partai Koalisi Indonesia Maju seperti Eric Tohir, Airlangga, Prof Yusril Ihza Mahendra, dll sampai dicopotnya Ketua MK Anwar Usman oleh Mahkamah Kehormatan MK melalui SK nomor 2/MKMK/L/11/2023. Ketua MK Prof. Jimly Ass-Shidiqy menandakan bahwa Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku hakim Konstitusi dan memberikan sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan (Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, n.d.).

Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Maka upaya Presiden Jokowi memaksakan anaknya menjadi Cawapres dianggap sudah menghidupkan Kembali penyakit orde baru yaitu KKN dan ini dianggap telah mencederai dan mengancam demokrasi di Indonesia. Adapun faktor terjadinya praktek politik dinasti banyak sekali, diantaranya kandidasi politik yang cenderung tertutup,

sentralisasi politik, kaderisasi partai yang tidak berjalan optimal, jaringan kekuasaan menyebar dari kelompok tertentu dan kekuatan absolut pada suatu jabatan.



Gambar 1. Faktor Penyebab Munculnya Politik Dinasti

LITERATUR

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa dinasti merupakan keturunan raja-raja yang memerintah suatu kerajaan, dan semuanya berasal dari satu keluarga. Politik dinasti merupakan kekuasaan yang secara turun temurun didominasi oleh satu kelompok keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Secara terminologi, politik dinasti berarti politik dimana jabatan publik didapatkan dan diwariskan secara turun temurun tanpa adanya jeda dari pihak lain. Politik dinasti seringkali dianggap menjadi penyebab mundurnya demokrasi. Bahkan dalam teori politik modern hal seperti itu dianggap melanggar hukum yang tidak tertulis dan melabrak norma politik (wikipedia, n.d.).

Secara historis, akar dinasti politik telah muncul sejak jaman Yunani Kuno sampai muncul dalam perpolitikan modern saat ini. Keberadaan politik kekerabatan atau dinasti politik merupakan strategi untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan agar kekuasaan hanya berada di lingkaran keluarga dari generasi ke generasi (Habodin, 2017). Sudah merupakan naluri dasar manusia, menginginkan agar tetap menjaga kekuasaan agar langgeng dan ingin berada di zona aman dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa dinasti merupakan keturunan raja-raja yang memerintah suatu kerajaan, dan semuanya berasal dari satu keluarga.

Politik dinasti merupakan kekuasaan yang secara turun temurun didominasi oleh satu kelompok keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Secara terminology, politik dinasti berarti politik dimana jabatan publik didapatkan dan diwariskan secara turun temurun tanpa adanya jeda dari pihak lain. Politik dinasti seringkali dianggap menjadi penyebab mundurnya demokrasi. Bahkan dalam teori politik modern hal seperti itu dianggap melanggar hukum yang tidak tertulis dan melabrak norma politik (wikipedia, n.d.).

Secara historis, akar dinasti politik telah muncul sejak jaman Yunani Kuno sampai muncul dalam perpolitikan modern saat ini. Keberadaan politik kekerabatan atau dinasti politik merupakan strategi untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan agar kekuasaan hanya berada di lingkaran keluarga dari generasi ke generasi (Habodin, 2017). Sudah

merupakan naluri dasar manusia, menginginkan agar tetap menjaga kekuasaan agar langgeng dan ingin berada di zona aman dan nyaman sehingga melakukan upaya apapun agar kekuasaannya tetap berada dalam genggamannya (Djati, 2015). Ada beberapa macam tipologi dinasti politik yaitu populism dynasties, octopussy dynasties dan tribalism dynasties.

Populism dynasties (dinasti berbasis populisme) merupakan upaya untuk tetap mengamankan program yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Dinasti model ini berupaya mereproduksi wacana heroism dan mengangkat program populis pemimpin sebelumnya untuk dijadikan sebagai objek kampanye politik bagi kerabatnya yang lain dalam memenangkan kostestasi politik.

Kedua, Octopussy Dynasties (dinasti berbasis jaringan kuasa). Dinasti ini dibentuk berdasarkan adanya figure yang karismatik dan sinergi antara actor formal dan informal. Karakter rezim model ini cenderung bersifat oligarkis. Dinasti model ini merupakan strategi politik kekerabatan yang dilakukan dengan terencana (by design) untuk mendorong para kerabatnya untuk menempati jabatan politik.

Ketiga, Tribalism Dynasties. Model dinasti ini merujuk pada hubungan politik kekerabatan yang berdasarkan pada identitas social seperti ikatan kesukuan, marga dan kekeluargaan (Agus Dedi, 2022).

METODE PENELITIAN

Panelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan observasi dan wawancara mendalam kepada para Ketua Partai pengusung Prabowo-Gibran serta mengutip pandangan para pengamat politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru Besar Politik dari FISIP Universitas Airlangga Marijan memiliki pandangan tersendiri di dalam memandang fenomena ini dimana dia beranggapan bahwa pengusungan Gibran itu merupakan strategi yang sangat serius dari Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Dapat dipahami karena Prabowo sudah tiga kali mengikuti kontestasi dan terus mengalami kekalahan. Prabowo berharap strategi itu mampu menggaet suara para pendukung Jokowi. Menggaet Gibran juga diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda, yang diperkirakan merupakan 50% dari total pemilih.

Selain itu, karena Jawa Tengah memiliki basis pemilih terbesar di Indonesia, Prabowo diperkirakan akan menerima limpaan suaran. Karena, menurut survei yang dilakukan LSI, Ganjar mendapat lebih banyak suara dengan 32%, sementara Prabowo hanya memperoleh 16%. Namun Prabowo diingatkan oleh Prof Kacung bahwa keputusannya ini membawa risiko dan tantangan. Menurutnya, dua hal utama yang dapat menghalangi pemilih yang kritis terhadap kehadiran Gibran adalah kurangnya pengalaman dan politik dinasti yang berkaitan dengan legasi Jokowi.

Marijan menemukan bahwa elemen pengalaman yang berkaitan dengan latar belakang dan riwayat politik Gibran sangat sedikit. Hubungan Gibran dengan Presiden Jokowi, ayahnya, adalah faktor politik dinasti, dan dia adalah salah satu politisi muda yang baru memulai karir politiknya sebagai Walikota Solo sejak 2020. Dianggap sebagai bagian dari dinasti politik

Jokowi, yang juga terdiri dari adiknya, Kaesang Pangarep, dan menantunya, Bobby Nasution, yang juga merupakan walikota Medan, Gibran juga dianggap sebagai bagian. Sebagian masyarakat sering mengkritik politik Dinasti sebagai nepotisme dan oligarki. Selain itu, tiketnya diperoleh dari penipuan pamannya di MK.

Menurut Kacung kedua faktor inilah yang akan menjadi tantangan bagi Prabowo dan Gibran untuk meyakinkan pemilih. Kalau bisa meyakinkan, maka akan mendapatkan dukungan dan kemenangan, tapi kalau gagal meyakinkan maka Prabowo akan kalah lagi (Fitriyah, 2023).

Fenomena tampilnya Gibran juga banyak mendapat respon dari media internasional, bahkan sejak awal kemunculan Gibran pada Pilkada Solo 2020, Reuters menyoroti bahwa pencalonan Gibran di Pilkada Solo telah menimbulkan kecurigaan bahwa Jokowi sedang membentuk dinasti baru. Dan hanya selang dua tahun, kecurigaan itu sudah terbukti.

Pada dasarnya, demokrasi dapat dianggap berhasil hanya jika kebijakan dan praktik politik saat ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia yang didasarkan pada keadilan sosial. Jika ini tidak terjadi, maka demokrasi dapat dipertanyakan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa praktik demokrasi malah akan menghasilkan dan memperkuat oligarki dan elit. (Nizar & Al qarni, 2021).

Di satu sisi, peningkatan demokrasi melalui Pilpres 2024 harus dihargai, tetapi jangan terperangkap dalam formalitas demokrasi. Jebakan ini sangat berbahaya karena tidak hanya mengancam demokrasi Indonesia tetapi juga dapat menghasilkan rezim politik yang korup yang semata-mata mementingkan kekuasaan daripada membantu masyarakat yang merupakan sumber kedaulatan sebenarnya. Dinasti politik oligarki telah muncul sebagai hasil dari fenomena pemilihan presiden 2024. Mereka mulai mendorong anak-anak dan mantunya untuk berpartisipasi dalam kontestasi dari pilkada hingga pemilihan presiden. (Rahma et al., 2022).

Huntington mengingatkan bahwa, secara teoritis, peran pemilu dalam penegakkan demokrasi hanya terbatas pada aspek prosedural, memungkinkan rakyat memilih sesuai keinginannya politik dan memungkinkan pemerintahan suatu negara berfungsi sebagai legitimasi. Salah satu syarat demokrasi prosedural minimal adalah pemilihan yang jujur dan adil, rotasi kekuasaan yang adil, pelibatan yang signifikan setiap orang dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan jaminan yang memadai bagi hak-hak sosial dan ekonomi.

Tampilnya Gibran sebagai Cawapres Prabowo tidak lepas dari jasa dan pengaruh orang kuat yang dalam hal ini Presiden Jokowi sang ayah. Menurut analisis literatur, orang kuat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan (power), otoritas (authority), pengaruh (influence), suara (voice), kontrol (control), dan akses untuk mempengaruhi orang lain untuk memenuhi keinginan mereka. Selain itu, orang kuat didukung oleh berbagai sumber daya, termasuk kekayaan sosial, keuangan, spiritual, budaya, tradisional, intelektual, dan struktural. (Syauket, 2021).

Dalam rubrik Opini, majalah Tempo menyoroti dengan tajam dengan judul anak haram konstitusi. Disebutkan bahwa Gibran telah kehilangan legitimasi sebagai calon wakil presiden karena diloloskan oleh keputusan MK yang culas. Gibran tak berhak mengikuti kontestasi Pemilu 2024 karena masuk gelanggang dengan aturan main yang telah diakali bapak dan pamannya. Sebagai kepala negara, Jokowi tidak sepatutnya mengacak-acak Pemilu demi ambisinya memperpanjang kekuasaan.

Pasangan Prabowo-Gibran menjadi pasangan paling buruk dalam Indonesia modern, produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tidak mundur, tatanan

bernegara akan makin rusak karena Jokowi makin tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya demokrasi.

Pewarisan kekuasaan kepada keluarga memiliki satu tujuan yakni mengamankan kedudukan keluarga di tengah kehidupan sosial dan politik. Memasuki periode reformasi, ruh dari praktik politik kekerabatan kian terasa dan menghasilkan dinasti politik (Nizar & Al qarni, 2021). Dalam pendekatan filosofis komunikasi politik, pada prinsipnya politik itu adalah proses pengambilan keputusan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi didedikasikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Oleh sebab itu cita-cita politik harusnya diorientasikan untuk menciptakan seorang pejabat atau pemimpin yang memiliki komitmen untuk menjadi 'negarawan' bukan hanya 'politisi'. Politik Indonesia hari ini kaya akan politisi tapi miskin negarawan.

Oleh karena posisi negarawan tidak bisa dicapai kecuali melalui keikhlasan dan kejujuran, maka komunikasi politik memiliki filosofi yakni pendayagunaan sumberdaya komunikasi baik itu sumberdaya manusia, infrastruktur maupun piranti lunak untuk mendorong terwujudnya system politik yang mengusung demokrasi dimana kekuasaan menjalankan pemerintahan ada di tangan pemenang pemilu (mayoritas) dengan melindungi hak-hak golongan yang kalah (minoritas). Dengan demikian demokrasi menjadi cita-cita yang luhur sesuai dengan hati nurani, sehingga dapat diabdikan untuk kepentingan semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang dalam membangun suatu kebersamaan menuju tujuan yang sama. Bukan malah menganggangi dan memanipulasi konstitusi untuk kepentingan keluarganya (Purwaningsih, 2023).

SIMPULAN

Praktek politik dinasti yang dilakukan oleh presiden Jokowi dengan mendorong Gibran menjadi Cawapres Prabowo dengan memanipulasi konstitusi telah membawa bangsa ini ke lorong gelap demokrasi. Amanat reformasi 98 yang salah satunya mengharamkan nepotisme telah dikhianati oleh sang presiden. Dahsyatnya nafsu berkuasa dan mempertahankan kekuasaan telah membutakan mata hatinya sehingga dengan teganya meninggalkan Partai yang selama ini membesarkan dirinya dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dedi. (2022). POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1).
<https://doi.org/10.25157/Moderat.V8i1.2596>
- Djati, W. R. (2015). Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(2).
<https://doi.org/10.7454/Mjs.V18i2.3726>
- Fitriyah, A. (2023). *Pakar Politik UNAIR Sebut Pengusungan Gibran Jadi Strategi Jangka Panjang*. www.unair.ac.id.
- Habodin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. UB Press, .
- Nizar, M., & Al Qarni, W. (2021). Dinasti Politik Dan Demokrasi Lokal. *DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH*, 9(April).
- NN. (2023). *Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres*. www.dpr.go.id.
- Pembentukan Dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Purwaningsih, T. (2023). *Politik Dinasti Di Indonesia: Sejarah Dan Dampaknya Bagi Demokrasi*. Fisipol Press.
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022).

- Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Syauket, A. (2021). *Membangun Dinasti Politik Oligarki Yang Korup*. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Tempo. (2023, September). Ugal-Ugalan Paman Gibran. *Tempo*.
- Wikipedia. (N.D.). *Keluarga_Politik*. <https://id.wikipedia.org/wiki/>
- Yanwardhana, E. (2023). *Ini Arti Kata Cawe-Cawe Yang Jokowi Sebut*. [www.Cnbcindonesia.Com](http://www.cnbcindonesia.com).